

DAMPAK KEBIJAKAN KOLONIAL DI JAWA

Yuliati

Jurusan Sejarah FIS Universitas Negeri Malang

Abstract. In Indonesia history, colonial policy in 19th century was main cause destruction of traditional economic and politic. The Java traditional life with traditional ties was replaced by legal rational ties. Decline of traditional rulers and more intensive European influence until village level had changed map of social-economic relation. Two phenomena will be sough so that known its impacts. This essay will reveal Java situation in 19th century and its impacts as a result of European penetration.

Keywords: Colonial Policy, Java, Impact, Social Economy

Masyarakat Jawa tradisonal di pedesaan memiliki ikatan desa yang menjurus pada dua kutub. Kutub pertama berupa solidaritas horisontal, sedang kutub lainnya berupa loyalitas vertikal. Kedua macam ikatan ini mendasari seluruh aktivitas desa.

Ikatan solidaritas horisonal dilukiskan sebagai kewajiban *tulung tinulung* atau *sambat sinambat*. Ikatan-ikatan praktis ini seterusnya dieratkan oleh beberapa nilai moral yang utama desa di Jawa, seperti nilai gotong royong, *padha-padha* (sama-sama, sama rata), dan *tepa slira* (mawas diri)¹. Ikatan loyalitas vertikal yaitu rasa tunduk kepada atasan yang tidak dapat dilepaskan dari struktur masyarakat feodal, dalam arti membentuk sistem stratifikasi fungsional dengan distribusi kekuasaan menurut tingkatnya.

Desa tradisional dengan ikatan desanya merupakan suatu kehidupan ekonomi sederhana dari penduduk tani yang menghasilkan barang-barang untuk pemuasan langsung kebutuhan-kebutuhan sendiri dan mereka mencukupi segala kebutuhannya (ekonomi subsistensi)². Di lapangan pertukangan terdapat spesialisasi menurut desanya. Perdagangan dan lalu lintas sedikit sekali, juga faktor-faktor produksi dan hasil-hasil tanah hampir tidak diperjualbelikan. Keadaan demikian menjadikan uang kurang berperan. Di dalam pergaulan desa pun,

kebutuhan akan organisasi ekonomi sedikit sekali, karena kebutuhan itu dicukupi terutama melalui tolong menolong.

Bangsa Indonesia di samping bangsa asing lainnya, seperti bangsa Eropa, Cina dan Arab memainkan peran perdagangan dengan penimbunan barang-barang di pelabuhan. Pada masa kontak pertama dengan bangsa Eropa, mereka mengadakan jual beli dengan Portugis, terutama dengan menjual surplus beras dan beberapa hasil produksi dari masyarakat pinggir sungai untuk ditukar dengan barang konsumtif (barang mewah), namun fungsi perdagangan di sini tidak menjadi pencarian utama, karena saat tersebut terdapat tiga pola perekonomian, yaitu sistem ladang, sistem sawah dan sistem perdagangan³

Sistem perladangan yang berlaku adalah *shifting agriculture*. Sistem ini dilakukan di hutan dengan cara menebang pohon dan membakarnya, maksudnya agar cepat mendapat kesuburan tanah dan tanah ini jika tidak menguntungkan lagi dilakukan pembukaan hutan di tempat lain dengan cara yang sama, atau kembali ke tanah yang sudah digarap sebelumnya.

Pertanian sawah digunakan untuk memproduksi beras, sehingga sawah dipelihara dengan baik dan sungguh-sungguh oleh suatu organisasi sosial. Irigasi dibangun

untuk pengairan meskipun masih dalam taraf yang terbatas.

Kebijakan Kolonial Abad XIX

Pemerintah kolonial di Indonesia pada abad ke-19 menerapkan 3 kebijakan baru yaitu sistem sewa tanah, *cultuurstelsel* dan sistem liberal⁴. Sistem sewa tanah diciptakan oleh Letnan Gubernur Raffles, penguasa Inggris di Jawa, yang memerintah selama lima tahun (1811-1816). Dasar-dasar kebijakan ekonomi yang dibuatnya mempengaruhi sifat dan arah kebijakan pemerintah berikutnya hingga tahun 1830.

Raffles menciptakan suatu sistem ekonomi yang bebas dari segala unsur paksaan, yang sebelumnya terdapat pada sistem penyerahan paksa dan pekerjaan rodi yang dijalankan Kompeni (VOC) yang bekerja sama dengan penguasa tradisional. Dalam usahanya ini, ditegakkan suatu kebijakan baru, yang berpatokan pada tiga asas: *pertama* segala bentuk dan jenis penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi dihapuskan dan kebebasan penuh diberikan kepada rakyat untuk menentukan jenis tanaman yang akan ditanam tanpa ada paksaan. Kedua, menghapus peran bupati sebagai pemungut pajak, para bupati dijadikan bagian integral dari pemerintah kolonial dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang sesuai dengan asas di Eropa. Hal ini berarti para bupati dan kepala pemerintahan pada tingkat yang lebih rendah harus memusatkan perhatian pada pekerjaan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Ketiga, pemerintah kolonial adalah pemilik tanah, maka petani yang mengerjakan tanah dianggap menyewa milik pemerintah, sehingga mereka diwajibkan membayar sewa tanah (*land-rent*).

Konsep Raffles ini diteruskan oleh pemerintah Komisaris Jendral Van der Capellen dan Du Bus (1826-1830). Akan tetapi sistem ini ternyata tidak sukses, terutama untuk merangsang petani agar

menanam tanaman ekspor yang laku di pasaran Eropa. Kegagalan ini disebabkan petani belum terbiasa menanam tanaman jenis ekspor yang memerlukan penanganan khusus, di samping mereka telah terbiasa menanam komoditi pangan.

Kebijakan pemerintah kolonial untuk meningkatkan tanaman ekspor dilanjutkan oleh penguasa baru tahun 1830, yaitu Johannes van den Bosch. Gubernur Jendral baru ini menganalisis kegagalan pemerintah sebelumnya, sehingga akhirnya Bosch mengajukan suatu sistem yang dapat mendatangkan keuntungan dengan cara yang lebih sesuai dengan kebiasaan tradisional lokal. Bosch mengenalkan sistem *Cultuurstelsel* atau *stelsel* penanaman, dan suatu periode baru digunakan untuk melaksanakannya.

Sesuatu yang baru namun lama adalah menggunakan penguasa tradisional untuk mengawasi sistem ini, bersanding dengan pegawai Belanda⁵. Ide konservatif ini digunakan kembali oleh Bosch karena lebih sesuai dengan rumah tangga desa dan penguasa feodal harus dikembalikan pada posisi semula, karena pengaruh mereka dapat digunakan untuk menggerakkan rakyat memperbesar produksi dan menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang dijalankan oleh pemerintah.

Sistem *Cultuurstelsel* dengan segala paksaan dan monopolinya dapat memberi hasil besar bagi pemerintah kolonial dan mendorong memajukan perdagangan dan pelayaran Belanda. Selanjutnya, sistem ini juga memperkaya pengusaha-pengusaha pabrik, pedagang dan lainnya yang berdampak tumuhnya modal perdagangan dan modal industri swasta. Pemulihan di bidang ekonomi ini disertai dengan lahirnya Partai Liberal yang merupakan oposan politik konservatif, terutama pada kebijakan *cultuurstelsel*.

Desakan Partai Liberal yang menuntut liberasi ekonomi di Hindia Belanda

membuahkan hasil, karena tahun 18370 diluncurkan Undang-Undang Agraria. U.U. Agraria ini melarang pengambilalihan tanah pribumi oleh orang asing, mereka hanya diijinkan menyewa dalam waktu lima tahun, yang dapat diperpanjang lagi. Untuk perkebunan swasta yang memerlukan lahan luas, penyewaan tanah diijinkan kontrak jangka panjang selama 75 tahun. Kebijakan ini membuat perusahaan perkebunan swasta banyak yang menanamkan modal di Hindia Belanda. Politik liberal ini membawa dampak besar bagi kehidupan sosial dan ekonomi penduduk desa, selain perubahan yang diakibatkan oleh *cultuurstelsel* dan sewa tanah yang telah diterapkan lebih dahulu.

Dampak Kebijakan bagi Masyarakat

Kebijakan Raffles dalam mengelola negara jajahannya pada prinsipnya ingin memberikan kepastian hukum dan kebebasan berusaha melalui sistem sewa tanah. Pelaksanaan sewa tanah ini mengandung tiga aspek kebijakan meliputi penyelenggaraan sistem pemerintahan atas dasar modern (Barat), pelaksanaan pemungutan sewa dan tanaman untuk ekspor⁶.

Menurut Raffles, dalam urusan ketatanegaraan pengaruh-pengaruh orang Eropa harus sampai kepada orang desa, sehingga kehidupan ekonomi maupun ketatanegaraan harus berdasar pada asas Barat. Oleh karena hal ini, jumlah pegawai-pegawai Eropa ditambah menjadi lebih banyak. Mereka diangkat sebagai asisten residen yang bertugas untuk mendampingi bupati dan mengawasi pamong praja serta sebagai pengawas penghasilan yang diperoleh dari tanah⁷.

Makin bertambahnya pengaruh pejabat-pejabat bangsa Eropa di pedesaan, maka pengaruh bupati sebagai kepala tradisional makin berkurang. Hal ini juga disebabkan karena dihapusnya sistem paksaan pada rakyat diganti dengan sistem

kontrak secara sukarela yang diadakan antara pemerintah dan rakyat dalam hubungan ekonominya. Keadaan ini mengakibatkan kekuasaan bupati merosot, karena mereka tidak lagi dapat menguasai tanah yang artinya tidak dapat menguasai rakyatnya.

Kemerosotan pengaruh kekuasaan bupati terhadap masyarakat desa ditunjang pula oleh peraturan baru yang dibuat Raffles, yaitu bupati digaji dengan uang. Kebijakan Raffles ini merupakan usaha untuk melumpuhkan ikatan loyalitas vertikal dengan dalih melenyapkan segala bentuk penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai seorang liberal, penduduk harus menikmati kepastian hukum, sehingga ia menetapkan rakyat harus membayar pajak secara individu. Sistem ini dijalankan berdasar anggapan bahwa pemilik tanah adalah pemerintah. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya menemui kendala karena tidak tersedianya keterangan yang baik dan dipercaya untuk menetapkan pajak yang dibayar. Untuk mengatasinya, pajak perseorangan diganti dengan pajak sedes yang maknanya kesewenangan pemungutan pajak muncul kembali, karena timbul *nebas desa*⁸ seperti kejadian di Gresik yang pembayaran pajak tanahnya ditanggung bupati, dan konsekwensinya, tanah beserta tenaga kerja desa tersebut dapat digunakan oleh bupati.

Pembayaran pajak tanah tidak selalu dibayar dalam bentuk uang, namun beberapa daerah di Jawa diijinkan membayar dengan hasil bumi, namun kenyataannya petani banyak yang membayar dengan uang⁹. Uang yang dibayarkan pajak berasal dari hasil menjual beras, karena beras merupakan satu-satunya benda yang dapat ditawarkan secara memadai, hal ini mengakibatkan perdagangan beras mengalami kemajuan.

Rencana Raffles yang dijalankan di Jawa berakibat terbebasnya petani-petani dari ikatan tradisionalnya dan orientasi mencari untung semakin menonjol, dan petani lebih bersifat individualis¹⁰. Sistem sewa tanah ini

dianjutkan oleh Belanda hingga tahun 1830, namun menemui kegagalan karena masyarakat Jawa belum begitu mengenal ekonomi uang dan yang pasti mereka ditinggalkan bupati sebagai kepala tradisional.

Pada masa pemerintahan Van den Bosch sejak 1830, dimulai suatu periode yang disebut *cultuurstelsel*, pajak diharuskan dibayar dalam bentuk kerja di perkebunan sebagai pengganti pajak tanah. Di samping itu pemerintah Hindia Belanda menentukan pemungutan kerja paksa tidak secara individu lagi, namun melalui sistem kuota dan per desa.

Alat untuk menjalankan *cultuurstelsel* menggunakan ikatan desa dan pengabdian feodal. Hal ini mengakibatkan kedudukan para bupati dikembalikan kepada tempat semula sebagai kepala tradisional rakyatnya, dan cara untuk meningkatkan prestise bupati adalah dengan menyerahkan tanah kepada bupati dengan tujuan penduduk dapat memberikan tenaga dan hasil dari tanah akan mengalir kepada pemerintah kolonial. Kebijakan ini sepertinya mengangkat prestise para kepala tradisional, namun sesungguhnya pengaruh para bupati diperkecil, sebab mereka hanya sebagai mandor penanaman¹¹. Untuk mengawasi sistem baru ini, pegawai Belanda disebar diantara para bupati, hal ini merupakan awal dari pengawasan dan pemerintahan tidak langsung, yang menempatkan seorang penasehat Belanda berdampingan dengan pegawai tinggi Indonesia¹².

Cultuurstelsel memperkenalkan tanaman ekspor kepada petani, sementara ekonomi padi yang subsistensi tidak terganggu, sehingga menimbulkan dual ekonomi. Pada sisi pertama merupakan sektor barat yang produksinya berdasar pada modal, sedang sisi lain adalah sektor timur yang produksi intensifnya bersandar pada tenaga¹³. Kedua sektor ini hidup berdampingan dalam kehidupan ekonomi-

an di Hindia Belanda, karena para petani di desa tidak terpengaruh oleh perekonomian Barat, sehingga masyarakat Jawa tidak mengalami suatu kemajuan yang berarti dalam bidang perekonomian desa.

Kemajuan ekonomi yang tidak berarti dalam masyarakat desa ini bukan sebagai penghambat bagi pertumbuhan penduduk. Pada masa *cultuurstelsel* terjadi peningkatan jumlah penduduk. Hal ini dapat diterangkan oleh pandangan orang Jawa tentang anak. Para petani terdorong mendapatkan anak sebanyak-banyaknya karena pandangan mereka bahwa hanya dengan tenaga kerja yang banyak maka kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan untuk menyerahkan tenaga kerja kepada pemerintah kolonial dapat dipenuhi, hal demikian yang menyebabkan angka kelahiran menjadi tinggi¹⁴.

Akibat dari pertumbuhan penduduk yang pesat sedangkan lahan pertanian semakin sempit, terutama di daerah penanaman tebu, akhirnya terjadi suatu involusi di bidang pertanian¹⁵, maksudnya masyarakat Jawa tidak mengalami kemajuan yang meningkat, tetapi berkembang ke arah dalam, dalam arti yang mengalami perkembangan hanyalah bidang kultural, seperti bahasa, wayang, dan lainnya.

Tanaman ekspor yang dikenalkan pada masa *cultuurstelsel* dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu tanaman tahunan dan tanaman keras¹⁶. Tanaman tahunan ditanam di sawah bergiliran dengan padi, seperti tebu, nila, tembakau dan tanaman keras yang tidak dapat bergiliran dengan padi seperti kopi, teh dan lada. Tanaman tebu dan kopi merupakan jenis tanaman yang menggunakan tanah yang luas, menyerap banyak tenaga kerja, di samping menghasilkan keuntungan yang tinggi.

Tanaman tebu memerlukan irigasi dan lingkungan yang hampir sama dengan padi, sehingga tebu ditanam berdasar sistem sewa desa yang feodal. Untuk mengatasi

penanaman tebu ini pemerintah kolonial mengambil kebijakan dengan menggunakan sistem giliran atau *geblagan*¹⁷, artinya tanaman tebu digilirkan dengan tanaman padi di sawah tiap 18 bulan dan sebagai pengganti kerugian penduduk desa, mereka mendapat tanah di luar lingkungan pabrik.

Untuk meningkatkan hasil produksi gula, dilakukan beberapa cara, misalnya teknik pengolahan di perusahaan-perusahaan gula diperbaiki, produksi setiap hektar diperbesar dengan memperluas areal sawah, juga dibangun prasarana jalan di samping memperbanyak alat angkut tebu. Untuk menunjang tujuan ini digunakan kerja bebas, yakni kerja upah yang tidak berdasar pada paksaan, melainkan pada perjanjian sukarela. Kerja bebas ini dapat dibedakan menjadi kerja menanam, panen, pengangkutan dan kerja pabrik¹⁸. Dampak lain adanya kerja bebas adalah munculnya spesialisasi di bidang transportasi¹⁹. Pekerjaan transport ini berkembang sebagai sebuah aktifitas yang disengaja dan merupakan kontrak antara pabrik dan kusir dokar. Pekerjaan pengangkutan di Pasuruhan mengakibatkan timbulnya kelompok baru, yaitu munculnya orang-orang kaya baru di desa karena pekerjaannya sebagai perantara²⁰. Sistem kontrak yang dilakukan oleh pengusaha tebu membawa dampak yang dalam bagi masyarakat desa, yaitu tanah menjadi lebih bersifat individu. Hal ini terjadi karena tanah sudah dianggap memiliki nilai finansial yang tinggi.

Selain tanaman tebu, tanaman kopi sebagai tanaman keras menduduki posisi penting. Penanaman tanaman kopi dilakukan pada tanah-tanah yang belum dibuka. Salah satu akibat dari penanaman kopi yaitu timbulnya kantong-kantong perkebunan dengan para pekerja tetap yang tinggal di daerah sekitar perkebunan²¹. Hal ini terjadi karena ladang kopi jauh dari pedesaan, sehingga penggarap harus meninggalkan

rumah dalam waktu panjang dan akhirnya mereka memutuskan tinggal di barak-barak.

Perencanaan yang tidak sempurna dari pemerintah kolonial di dalam menunjukkan lokasi tanaman dagangan, yaitu terlalu jauh dari desa, mengakibatkan pekerja tidak memiliki kesempatan untuk mengerjakan tanah pertanian mereka. Keadaan ini dapat dijumpai di Cirebon, yang penanaman padinya relatif sedikit dibanding dengan penanaman dagangan. Keadaan menjadi parah ketika tahun 1843 panen padi di beberapa daerah di pantai utara Jawa mengalami kegagalan. Kegagalan panen dan beban pajak yang berat mengakibatkan bahaya kelaparan di Cirebon, Demak tahun 1848, serta Grobogan (1849 dan 1850)²².

Bencana kelaparan yang terjadi secara beruntun sejak tahun 1840 ini menarik perhatian golongan liberal untuk bersuara, seperti Baron van Hoevel dan Douwes Dekker yang karyanya berjudul *Max Havelar*. Golongan liberal menentang pelaksanaan *cultuurstelsel* karena implikasi yang timbul dan mereka hendak menggantikan dengan inisiatif swasta. Untuk hal ini, kondisi ekonomi perlu diciptakan dengan memberi kebebasan bekerja dan pemanfaatan tanah. Dengan dikeluarkannya U.U. Agraria tahun 1870 membuka Jawa untuk seluas-luasnya dikelola perusahaan dan modal swasta.

Undang Undang Agraria ini pada pokoknya berisi antara lain persyaratan sewa tanah dengan persyaratan tertentu, yaitu: tanah milik pribumi yang dapat disewa selama 5 tahun, tanah yang dapat disewa selama 30 tahun dan semua kontrak harus didaftarkan. Selain itu tanah pemerintah dapat disewa untuk jangka waktu 75 tahun yang biasa disebut *hak erpacht*.

Dampak diijinkannya *hak erpacht* ini menimbulkan perkebunan besar, seperti perkebunan gula, teh, tembakau dan tanaman dagang lainnya. Perkembangan pesat pembukaan lahan perkebunan terjadi antara

tahun 1870 dan tahun 1885 karena terusan Suez dibuka pada tahun 1869, yang berjasa untuk mengurangi jarak antara negara penghasil tanaman dagang dan negara pasaran di Eropa Barat²³. Di samping itu, karena adanya permintaan yang meningkat terhadap bahan mentah dan bahan makanan dari Eropa dan Amerika serta mengalmirnya modal asing ke Hindia Belanda.

Selama jaman liberal, pemerintah Hindia Belanda membangun banyak prasarana untuk menunjang produksi tanaman ekspor. Salah satu prasarana yang penting adalah waduk-waduk dan saluran irigasi yang berfaedah meningkatkan produktifitas. Akibat dibangunnya irigasi maka ada perluasan daerah pertanian yang diikuti dengan peledakan penduduk, di samping terjadi penyebaran pemukiman.

Untuk memperlancar sarana transportasi, dibangun jalan kereta api, selain adanya perbaikan jalan darat atau jalan Daendels yang membentang dari Anyer-Panarukan. Pembangunan sarana sosial, seperti lembaga pendidikan bagi penduduk dikembangkan pula. Tujuan utama dari pemerintah kolonial sebenarnya adalah untuk mendidik juru tulis dan pamong. Pendidikan mulai diperhatikan pada pertengahan abad ke-19, dengan didirikan Sekolah Pendidikan Guru tahun 1851, dan juga berdirinya sekolah Dokter Jawa yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan petugas kesehatan²⁴. Menyusul kemudian tahun 1878 didirikan *Hoofden Scholen* (sekolah para pemimpin) di Jawa. Adanya pendidikan ini, pada akhir abad ke-19 menghasilkan golongan elit baru yang didasarkan kriteria intelektual individu, dan juga menghasilkan prototipe pegawai pemerintah.

Akibat dari perkembangan perdagangan dan munculnya perusahaan swasta, memaksa pemerintah kolonial untuk membagi karesidenan menjadi beberapa *afdeling* yang dikepalai oleh asisten residen. Di samping itu juga menambah jumlah

kontroler yang berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah Belanda dan bumi putera, sedangkan di dalam cabang-cabang pemerintah bumiputera diadakan reorganisasi yang dimotori oleh Fransen van de Putte pada tahun 1874. Ia meningkatkan kontrol pada tingkat bawah yang berhubungan dengan rakyat dengan cara membagi distrik menjadi sub distrik, dimana setiap sub distrik terdiri dari kurang lebih 15 desa di bawah pengawasan seorang asisten *wedana*, selain diangkat seorang patih untuk mendampingi bupati di tingkat kabupaten²⁵.

Di bawah struktur pangreh praja yang direorganisasi kedudukan bupati makin merosot. Pada masa VOC, kedudukan bupati sebagai alat untuk mengawasi penduduk, pada masa *cultuurstelsel* menjadi agen Belanda untuk mengawasi proses produksi hasil pertanian, namun pada akhir abad ke-19 ada kecenderungan untuk menggunakan bupati sebagai alat atau hiasan saja. Faktor menurunnya peran bupati ini karena tanggung jawab sebenarnya terpusat di tangan asisten residen, kontroler dan *wedana*²⁶.

Perusahaan-perusahaan baru yang didirikan di Hindia Belanda pada masa liberal mengalami perkembangan sehingga perusahaan ini lebih banyak membutuhkan personil yang didatangkan dari luar negeri sebagai tenaga ahli. Oleh karena itu, jumlah masyarakat Eropa di Hindia Belanda makin besar sehingga mereka menuntut kenyamanan seperti negeri asal, seperti kondisi yang lebih baik bagi sekolah-sekolah, perumahan dan pelayanan kesehatan. Keadaan ini menjadikan munculnya pemukiman-pemukiman khusus orang Belanda di Hindia Belanda.

Dampak lainnya dari tumbuhnya perusahaan perkebunan dan perdagangan adalah terjadinya urbanisasi ke kota atau pusat perkebunan. Faktor pendorongnya adalah berkurangnya lahan pertanian dan meningkatnya kaum miskin pedesaan.

Kemiskinan di pedesaan pada abad ke-19 mengakibatkan munculnya berbagai pemberontakan petani yang dipimpin oleh elit agama, seperti kiai, guru ilmu atau orang suci yang umumnya tokoh berkharia²⁷ yang bersandar pada pemikiran Ratu Adil.

Kesimpulan

Kebijakan kolonial yang diterapkan di Indonesia, terutama di Jawa pada abad ke-19 telah membawa dampak besar di seluruh bidang kehidupan. Kehidupan masyarakat tradisional yang subsistensi berubah dengan dikenalkan uang, tanaman ekspor dan sistem kontrak. *Cultuurstelsel* membawa dampak timbulnya perubahan seperti kedudukan bupati digeser menjadi alat kolonial, petani menjadi kuli perkebunan, lalu lintas uang dikenalkan, dan timbulnya kerja upah.

Kecaman dari golongan liberal mengakhiri sistem *cultuurstelsel*, dan dengan diundangkan UU Agraria tahun 1870 menjadikan persewaan tanah perkebunan marak. Sebagai dampak perkembangan perdagangan dan perusahaan swasta, memaksa pemerintah kolonial untuk membagi karesidenan ke dalam beberapa *afdeling*. Jumlah kontrolir pun ditambah dan memiliki fungsi sebagai penghubung antar pemerintah Belanda dengan Bumiputera.

Bidang pendidikan pun mendapat perhatian, dan masa liberal terjadi urbanisasi ke kota. Pada abad ke-19 telah terjadi perkembangan di bidang ekonomi, namun keadaan penduduk tetap hidup kekurangan, situasi ini mengakibatkan munculnya gerakan petani yang didasarkan pemikiran ratu adil.

¹ Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil*, terj. Poeradisastra (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hal. 39.

² D.H. Burger, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis indonesia Jilid I*. Terj. Prajudi (Djakarta: Pradnyaparamita, 1962), hal. 92-93.

³ Susan Abeyasekere, " Social and Economic Effects of Increasing European Penetration in the Nineteenth and Twentieth Centuries" dalam Elaine McKay (ed.), *Studies in Indonesian History* (Australia: Pitman Publishing Pty., Ltd., 1976), hal. 127.

⁴ Marwati Djoned Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Edisi Pemutakhiran, (Jakarta : Balai Pustaka, 2009), hal 345-350.

⁵ Robert van Niel, *Munculnya Elite Birokasi Modern*, terj. Zahara Deliar Noer (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hal. 43.

⁶ Marwati Djoned Poesponegoro, *op.cit.*, hal 348.

⁷ Ibid.

⁸ D.H. Burger, *op.cit.*, hal.142.

⁹ Ibid.hal.143.

¹⁰ Susan Abeyasekere, *op.cit.*, hal. 130.

¹¹ D.H. Burger. *op.cit.*, hal. 180.

¹² Robert van Niel, *op.cit.*, hal. 43.

¹³ Susan Abeyasekere, *op.cit.* hal.131.

¹⁴ Ina K. Slamet, *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa* (Djakarta: Bhrtara. 1965), hal. 43.

¹⁵ Clifford Geertz, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983), hal.84.

¹⁶ Ibid., hal. 56.

¹⁷ Susan Abeyasekere, *op.cit.*, hal 130.

¹⁸ D.H. Burger, *op. cit.*, hal. 190.

¹⁹ Allen M. Sievers, *The Mystical World of Indonesia: Culture and Economic Development in Conflict* (London: The John Hopkins Univesity Press, 1974), hal 109.

²⁰ R.E. Elson, *Javanese Peasant and the Colonial Sugar Industry* (Singapore: Oxford University Press, 1974), hal 109.

²¹ Clifford Geertz, *op.cit.*, hal. 61.

²² Marwati Djoned Poesponegoro, *op.cit.*, hal. 365.

²³ Ibid., hal. 374.

²⁴ Robert van Niel, *op.cit.*, hal. 46.

²⁵ Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Eite Birokrasi* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hal. 53.

²⁶ Ibid., hal 90.

²⁷ Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil, op.cit.*, hal. 14.

Daftar Rujukan

- Burger, D.H. 1962. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Jilid I. Djakarta: Pradnyaparamita, 1962.
- Elson, R.E. 1984. *Javanese Peasant and the Colonial Sugar Industry*. Singapura: Oxford University Press.
- Geertz, Clifford. 1983. *Involusi Pertanian. Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Slamet, Ina K. 1965. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Djakarta: Bhratara.
- Poesonegoro, Marwati Djoened, dan Notosusanto, Nugroho (eds.). 2009. *Sejarah Nasional Indonesia IV dan V*. Edisi Pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mc Kay, Elaine (ed.). 1976. *Studies in Indonesian History*. Australia: Pitman Publishing pty. Ltd.
- Van Niel, Robert. 1984. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sievers, Allen. 1974. *The Mystical World of Indonesia: Culture and Economic Development in Conflict*. London: The John Hopkins University Press.
- Sutherland, Heather .1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan.